

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Namun karena RPJMD Kabupaten Kuningan berakhir sampai tahun 2013 maka penyusunan RKPD Kab. Kuningan Tahun 2014 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005–2025. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 Pasal 287 ayat 2 bahwa “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi”

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Kuningan 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 didalamnya memuat arah pembangunan dua puluh tahun ke depan dengan Visi dan misi sebagai berikut :

“Dengan Iman dan Takwa Kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan Wisata Termaju di Jawa Barat Tahun 2025”

Visi ini menegaskan cita-cita yang hendak diwujudkan selama 20 tahun ke depan oleh Kabupaten Kuningan adalah menjadi Kabupaten pertanian dan wisata yang *paling maju* diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Visi tersebut menyiratkan makna bahwa untuk menjadi maju dalam konteks perbatasan pembangunan dengan wilayah lainnya Kabupaten Kuningan harus berfokus pada kedua bidang tersebut yang menjadi keunggulannya. Hal ini dengan tidak mengabaikan pelaksanaan pembangunan secara memadai pada bidang-bidang lainnya, karena pada hakikatnya pembangunan daerah adalah membangun masyarakat secara menyeluruh. Fokus terhadap bidang pertanian dan pariwisata bukan perwujudan semangat sektoral yang sempit, namun semata-mata

merupakan upaya menempatkan kedua bidang unggulan tersebut sebagai penggerak utama pembangunan menyeluruh di Kabupaten Kuningan.

Untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Panjang tersebut perlu ditempuh langkah-langkah besar yang terarah, kongkrit, dan memiliki ukuran-ukuran yang jelas. Langkah tersebut dituangkan dalam wujud Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan tahun 2005-2025.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh 6 Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan sebagai berikut.

1. **Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia.** Misi ini adalah membangun integritas dan kapasitas sumberdaya manusia Kabupaten Kuningan dengan meningkatkan akhlak dan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; meningkatkan keterampilan untuk menopang penghidupan; dan membangun sikap menghargai lingkungan. Dengan memiliki kualitas yang tinggi dalam seluruh aspek tersebut diharapkan sumberdaya manusia Kabupaten Kuningan bisa bersaing dengan sumberdaya manusia dari wilayah lain yang telah maju.
2. **Mewujudkan agribisnis yang tangguh dalam kerangka agropolitan.** Misi ini adalah membangun sistem agribisnis yang maju dalam kerangka kawasan pertanian terpadu (agropolitan) dengan meningkatkan sinergitas antara prasarana dasar (suprastruktur dan infrastruktur), sub-sistem sarana pertanian, sub-sistem budidaya pertanian, sub-sistem pengolahan hasil, dan sub-sistem penjualan; meningkatkan produktivitas budidaya dan industri agro; dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. **Mewujudkan pariwisata alam yang maju.** Misi ini adalah mengoptimalkan pengelolaan pariwisata alam daerah untuk menjadi yang terdepan di wilayah Ciayumajakuning/Jawa Barat dengan mengoptimalkan pendayagunaan pariwisata daerah; meningkatkan daya saing pariwisata daerah; dan menempatkannya sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Barat/Indonesia.

4. **Mewujudkan pemerataan pembangunan Daerah.** Misi ini adalah mewujudkan keseimbangan pelaksanaan pembangunan diantara bagian-bagian wilayah Kabupaten Kuningan berdasarkan permasalahan dan potensi masing-masing melalui distribusi alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan yang adil; pengembangan infrastruktur perhubungan di daerah terpencil dan perbatasan; peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah perkotaan; peningkatan daya beli; dan peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat.
5. **Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dengan berorientasi pada jasa lingkungan.** Misi ini adalah mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berfokus pada pemanfaatan jasa lingkungan melalui pelestarian kawasan lindung dan kawasan budidaya guna mencapai Kabupaten Konservasi; peningkatan konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, hutan, lahan, dan tambang; peningkatan penerimaan daerah dari jasa lingkungan; dan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana alam.
6. **Mewujudkan masyarakat yang agamis, mandiri, dan dinamis.** Misi ini adalah membangun masyarakat yang memiliki iman dan taqwa prakarsa, serta kemandirian yang tinggi dalam memenuhi penghidupannya serta memiliki sikap positif dan dorongan partisipasi yang tinggi dalam Pembangunan Daerah. Masyarakat tersebut memiliki sifat umum demokratis, saling pengertian, rukun, tenggang rasa, taat hukum, dinamis-konstruktif, serta memiliki perilaku sosial yang agamis.

4.1.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Kuningan 2005-2025 pada tahap III Periode 2014-2018 yaitu : *Pemantapan Kemandirian Masyarakat. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang memiliki kemandirian tinggi dalam membangun penghidupannya. Kemandirian tersebut sebagai implikasi dari berkembang pesatnya bidang pertanian dan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Wujud kemandirian tersebut*

yang utama adalah rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah, tingginya daya beli, tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian masyarakat merupakan kunci bagi terwujudnya pembangunan yang digerakan oleh masyarakat, yaitu suatu situasi dimana masyarakat menjadi subjek pembangunan dalam arti yang sesungguhnya.”(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Kuningan 2005-2025, hal 64)

Maka sesuai dengan yang tersirat di atas bahwa tujuan pembangunan untuk periode tahap III RPJPD 2005 – 2025 adalah : mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang memiliki kemandirian tinggi dalam membangun penghidupannya. Dengan sasarannya adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah,
- b. Tingginya daya beli masyarakat,
- c. Tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan

Adapun yang dimaksud dengan kemandirian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan para ahli bahwa “man-di-ri adalah keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain; atau pengertian kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

Sedangkan menurut Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)

2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi “power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

Payne (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Empowerment atau pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strength) kepada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan

keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

4.1.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran Strategis yang mendukung visi dan misi yang ingin dicapai dapat dilihat dari tabel hubungan Isu Strategis, Arah Kebijakan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan sebagai berikut ini :

Tabel

Hubungan Isu Strategis, Arah Kebijakan, Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

NO	Isu Strategis	Arah kebijakan:	Prioritas:	Sasaran:
1	Kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara proporsional dan berkeadilan.	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara adil dan merata yang diprioritaskan pada kecamatan dengan indeks kesehatan rendah.	Meningkatnya layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin; Meningkatkan pencegahan dan pengobatan; Meningkatkan promosi kesehatan; Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan; Meningkatkan usaha kesehatan berbasis masyarakat; Meningkatkan keluarga sadar gizi; Meningkatkan sarana prasarana kesehatan; Terbentuknya budaya Pola Hidup Bersih dan Sehat.
2	Kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan dalam rangka pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun	Peningkatan kualitas dan keterjangkauan pendidikan secara merata dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pendidikan semua jenjang; Meningkatkan minat baca masyarakat; Meningkatkan sarana prasarana pendidikan; Meningkatkan lembaga pendidikan yang transparan, partisipatif dan accountable; Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga.

NO	Isu Strategis	Arah kebijakan:	Prioritas:	Sasaran:
3	Peningkatan daya beli masyarakat	Meningkatkan daya beli masyarakat melalui usaha ekonomi masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok Peningkatan pemerataan distribusi logistik	Meningkatnya lapangan kerja baru; Perluasan kesempatan berusaha; Meningkatnya investasi daerah; Meningkatnya jiwa entrepreneur; Meningkatnya peran dan keberadaan pasar desa sebagai sentra jasa pelayanan dan distribusi; Meningkatnya kelembagaan dan pemberdayaan koperasi.
4	Penanggulangan Kemiskinan dan masalah sosial lainnya	Penguatan koordinasi penanggulangan kemiskinan	Penguatan Koordinasi Kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin	Menurunnya Jumlah penduduk miskin Meningkatnya pelayanan air Bersih dan sanitasi masyarakat Meningkatnya rumah layak huni Meningkatnya kualitas SDM dan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terwujudnya anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin Meningkatnya keberdayaan keluarga miskin
		Pengembangan manajemen penanggulangan bencana secara efektif untuk mengurangi korban akibat bencana.	Peningkatan kualitas mitigasi dan penanganan bencana.	Peningkatan kualitas mitigasi dan penanganan bencana. Meningkatnya kapasitas SDM satuan pelaksana penanggulangan bencana alam

NO	Isu Strategis	Arah kebijakan:	Prioritas:	Sasaran:
				<p>Meningkatnya kualitas kelembagaan pengelola penanggulangan bencana alam</p> <p>Meningkatnya pengendalian pengelolaan mitigasi bencana</p> <p>Meningkatnya pengendalian pengelolaan mitigasi bencana</p>
		<p>Peningkatan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial</p>	<p>Peningkatan jangkauan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan potensi sosial dan kesejahteraan sosial.</p>	<p>Meningkatnya pemberdayaan potensi sosial dan kesejahteraan sosial;</p> <p>Meningkatnya upaya pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>Meningkatnya jangkauan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>Meningkatnya jaminan perlindungan sosial.</p>
		<p>Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak</p>	<p>Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan serta perlindungan anak di segala bidang</p>	<p>Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan</p> <p>Meningkatnya penguatan program dan advokasi pengarusutamaan gender serta perlindungan anak di berbagai sektor yang terintegrasi</p> <p>Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan perlindungan anak</p> <p>Meningkatkan kualitas dan jumlah lembaga layanan korban kekerasan baik berbasis pemerintah, rumah sakit, masyarakat maupun swasta</p>

NO	Isu Strategis	Arah kebijakan:	Prioritas:	Sasaran:
5	Pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan	Peningkatan siertgas agribisnis dan ketahanan pangan lintas sektor	Meningkatkan perekonomian yang berbasis agribisnis dan ketahanan pangan Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi di bidang agribisnis	Peningkatan Sistem dan keleikro, kecil dan menengah Meningkatnya kelembagaan tata niaga komoditas pertanian Terwujudnya sistem investasi daerah yang efektif dan efisien Terwujudnya sistem informasi agribisnis Meningkatnya ketahanan pangan Meningkatnya jejaring agribisnis Meningkatnya sistem infrastruktur penunjang agribisnis Meningkatnya investasi usaha
6	Budaya dan destinasi wisata	Mewujudkan Kabupaten Kuningan sebagai destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat	Berkembangnya budaya daerah dan terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan daerah.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal; Terfasilitasinya gelar karya kreatifitas seni dan budaya lokal; Terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan daerah dalam rangka peningkatan kesiapan pariwisata di Kab.Kuningan.
7	Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur	Pengembangan infrastruktur wilayah secara berkeadilan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Pengembangan infrastruktur wilayah terutama dalam bidang pertanian dan pariwisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan strategis secara merata dan berkelanjutan.	Terbangunnya jalan poros antar desa
			Peningkatan koordinasi penataan ruang yang efektif dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang sinergis dengan	meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

NO	Isu Strategis	Arah kebijakan:	Prioritas:	Sasaran:
			tata ruang dan penataan lahan pertanian pangan berkelanjutan.	<p>Terpeliharanya sarana irigasi, embung dan waduk serta normalisasi sungai</p> <p>Meningkatnya sarana prasarana transportasi menuju kawasan sentra produksi dan kawasan wisata</p> <p>Terwujudnya sinergitas tata ruang dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan</p>
8	Penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung capaian ketahanan pangan, pengendalian bencana dan kawasan lindung.	<p>Pengelolaan pariwisata alam daerah yang profesional dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan partisipasi aktif masyarakat.</p> <p>Peningkatan dan penataan pengelolaan lahan/daerah rawan bencana dengan didukung oleh penghijauan dan penanganan lahan kritis bersama masyarakat.</p> <p>Pembangunan Ruang Terbuka Hijau pemukiman yang dicirikan oleh adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang utuh dan berkelanjutan.</p>	<p>Berkembangnya pengelolaan pariwisata alam berbasis masyarakat</p> <p>Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata</p> <p>Terselenggaraya penataan ruang kawasan rawan bencana</p> <p>Meningkatnya tutupan lahan pada kawasan rawan bencana</p> <p>Meningkatnya koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian RTH pemukiman</p>

NO	Isu Strategis	Arah kebijakan:	Prioritas:	Sasaran:
9	Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan hasil pembangunan	Peningkatan kinerja sektor utama perekonomian Kab.Kuningan Peningkatan investasi Daerah Peningkatan kerjasama antar Daerah dalam bidang perekonomian	Meningkatnya UMK/IKM Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian Meningkatnya industri agro dan aneka industri Menguatnya jejaring pasar Meningkatnya kelembagaan ekonomi di pedesaan
10	Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik	Mewujudkan aparatur yang profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Terwujudnya kualitas kelembagaan dan pengelolaan keuangan yang accountable dan transparan; Meningkatnya kualitas SDM aparatur; Meningkatnya kualitas layanan publik.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah; Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan good governance Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat; Meningkatnya pelayanan perizinan kepada masyarakat.
11	Database antar Sektor	Membangun keterpaduan dan keakuratan data base semua sektor yang up to date.	Membangun "Sistem Satu Data Pembangunan Kabupaten Kuningan".	Terbangunnya kerjasama antar SKPD dan BPS sebagai institusi untuk layanan data dasar Terbangunnya Pusat Basis data di Kabupaten Kuningan Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengolahan data
12	Sinergitas Kerjasama antar Daerah Perbatasan	mengintegrasikan berbagai kepentingan daerah baik secara fungsional, sosial ekonomi dan budaya di daerah perbatasan khususnya di wilayah perbatasan Jabar- Jateng	Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan

NO	Isu Strategis	Arah kebijakan:	Prioritas:	Sasaran:
			Meningkatnya sarana prasarana transportasi menuju kawasan sentra produksi, pemasaran, wisata potensial antar wilayah	<p>Terjalannya kerjasama antar daerah dalam penyediaan infrastruktur,</p> <p>Terjalannya kerjasama antar daerah dalam bidang keamanan</p> <p>Meningkatnya sarana prasarana transportasi menuju kawasan sentra produksi, pemasaran, wisata potensial antar wilayah</p> <p>Meningkatnya kapasitas SDM satuan pelaksana penanggulangan bencana alam;</p> <p>Meningkatnya kualitas kelembagaan pengelola penanggulangan bencana alam;</p> <p>Meningkatnya pengendalian pengelolaan mitigasi bencana;</p> <p>Meningkatnya sarana prasarana mitigasi bencana.</p>
13	Pengelolaan Aset Daerah	Mewujudkan pengelolaan aset daerah secara accountable.	Peningkatan sistem informasi pengelolaan dan kapasitas SDM pengelola aset daerah.	<p>Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah;</p> <p>Meningkatnya sistem informasi pengelolaan aset daerah;</p> <p>Meningkatnya kapasitas SDM pengelola aset daerah.</p> <p>Meningkatnya upaya pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>Meningkatnya jangkauan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>Meningkatnya jaminan perlindungan sosial.</p> <p>Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan</p>

NO	Isu Strategis	Arah kebijakan:	Prioritas:	Sasaran:
				Meningkatnya penguatan program dan advokasi pengarusutamaan gender serta perlindungan anak di berbagai sektor yang terintegrasi Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan perlindungan anak Meningkatkan kualitas dan jumlah lembaga layanan korban kekerasan baik berbasis pemerintah, rumah sakit, masyarakat maupun swasta
14	Kualitas Demokrasi dan Pemilu Nasional 2014	Peningkatan kualitas kualitas demokrasi.	Peningkatan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu secara aman dan kondusif.	Terlaksananya pemilu secara aman dan kondusif; Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1. Isu Strategis Daerah Tahun 2014

Mengacu pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2014 dijabarkan dalam bentuk isu strategis daerah sebagaimana berikut :

1. Kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan.

Dalam bidang kesehatan, kebijakan diarahkan pada upaya peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara proporsional dan berkeadilan. Saat ini aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan belum berjalan secara optimal. Oleh karenanya pemerintah senantiasa berupaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin; meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas puskesmas; mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak.

2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, kebijakan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan dalam rangka pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Saat ini masyarakat masih belum memperoleh aksesibilitas pendidikan secara merata. Pemerintah berupaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi; selain itu pemerintah berupaya menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua.

3. Peningkatan daya beli masyarakat

Pada periode ini, Kabupaten Kuningan ingin mencapai kemandirian tanpa tergantung kepada pemerintah pusat, maupun pihak lain. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mencapai kemandirian itu. Kebijakan diarahkan dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat melalui usaha ekonomi masyarakat

4. Penanggulangan Kemiskinan dan masalah sosial lainnya

Untuk tahun ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penguatan koordinasi penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah belum dapat menanggulangi problem kemiskinan dengan optimal. Sehingga pada tahun ini dilakukan optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah mencoba untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak terlantar, fakir miskin, lansia, penyandang cacat, dan masyarakat miskin. Dan sebagai daerah rawan bencana, pemerintah mengarahkan kebijakan kepada pengembangan manajemen penanggulangan bencana secara efektif untuk mengurangi korban akibat bencana. Sementara, dalam hal perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

5. Pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan

Dalam bidang ini, kebijakan diarahkan pada peningkatan sinergitas agribisnis dan ketahanan pangan lintas sektor. Langkah yang diambil

yaitu meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga pendukungnya, meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat, serta meningkatkan pengamanan ketahanan pangan.

6. Budaya dan destinasi wisata

Sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata yang unggul, pengelolaan budaya serta destinasi wisata Kab. Kuningan belum dilakukan secara maksimal. Oleh karenanya kebijakan diarahkan pada upaya mewujudkan Kabupaten Kuningan sebagai destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat. Langkah yang dilakukan antara lain berupa peningkatan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk dan destinasi wisata.

7. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur

Meskipun secara umum masyarakat cukup puas dengan pembangunan infrastruktur di Kab. Kuningan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan pemerataan pembangunannya agar dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah pelosok. Kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur wilayah secara berkeadilan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup

Dalam hal ini, arah kebijakan ditujukan pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung capaian ketahanan pangan, pengendalian bencana dan kawasan lindung. Pada akhirnya diharapkan akan terwujud keserasian pemanfaatan ruang dan pendayagunaan tanah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup, sesuai dengan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi.

9. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

Kemajuan suatu daerah ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai kemajuan itu, kebijakan diarahkan pada upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan hasil pembangunan

10. Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik

Kinerja aparatur dalam melayani publik selalu menjadi sorotan di masa reformasi ini. Untuk itu kebijakan diarahkan pada upaya mewujudkan aparatur yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima.

11. Database antar Sektor

Data merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan, data yang baik dan akurat akan menghasilkan kebijakan yang adil dan merata. Untuk itu, kebijakan diarahkan pada kegiatan membangun keterpaduan dan keakuratan data base semua sektor yang *up to date*.

12. Sinergitas Kerjasama antar Daerah Perbatasan

mengintegrasikan berbagai kepentingan daerah baik secara fungsional, sosial ekonomi dan budaya di daerah perbatasan khususnya di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.

13. Pengelolaan Aset Daerah

Salah satu syarat terwujudnya pemerintah yang akuntabel adalah adanya pengelolaan aset daerah yang baik. Oleh karenanya arah kebijakan ditujukan pada upaya mewujudkan pengelolaan aset daerah secara *accountable*.

14. Kualitas Demokrasi dan Pemilu Nasional 2014

Suasana Pemilihan pimpinan daerah maupun nasional selalu menjadi perhatian masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas demokrasi. Dengan didampingi oleh upaya untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas keamanan daerah, khususnya pada penyelenggaraan Pemilu Nasional 2014.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014

Prioritas 1 :

Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara adil dan merata yang diprioritaskan pada kecamatan dengan indeks kesehatan rendah.

Sasaran:

- Meningkatnya layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin;
- Meningkatnya pencegahan dan pengobatan;
- Meningkatnya promosi kesehatan;
- Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan;
- Meningkatnya usaha kesehatan berbasis masyarakat;
- Meningkatnya keluarga sadar gizi;
- Meningkatnya sarana prasarana kesehatan;
- Terbentuknya budaya Pola Hidup Bersih dan Sehat.

Prioritas 2 :

Peningkatan kualitas dan keterjangkauan pendidikan secara merata dan berkeadilan

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas pendidikan semua jenjang;
- Meningkatnya minat baca masyarakat;
- Meningkatnya sarana prasarana pendidikan;
- Meningkatnya lembaga pendidikan yang transparan, partisipatif dan *accountable*;
- Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga.

Prioritas 3 :

- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok
- Peningkatan pemerataan distribusi logistik

Sasaran:

- Meningkatnya lapangan kerja baru;
- Meluasnya kesempatan berusaha;
- Meningkatnya investasi daerah;
- Meningkatnya jiwa entrepreneur;
- Meningkatnya peran dan keberadaan pasar desa sebagai sentra jasa pelayanan dan distribusi;
- Meningkatnya kelembagaan dan pemberdayaan koperasi.

Prioritas 4:

- Penguatan Koordinasi Kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
- Peningkatan jangkauan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan potensi sosial dan kesejahteraan sosial.
- Peningkatan pemberdayaan dan peran perempuan serta perlindungan anak di segala bidang.
- Peningkatan kualitas mitigasi dan penanganan bencana.

Sasaran:

- Menurunnya Jumlah penduduk miskin
- Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
- Meningkatnya rumah layak huni
- Meningkatnya kualitas SDM dan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- Terwujudnya anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin
- Meningkatnya keberdayaan keluarga miskin
- Meningkatnya pemberdayaan potensi sosial dan kesejahteraan sosial;
- Meningkatnya upaya pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- Meningkatnya jangkauan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- Meningkatnya jaminan perlindungan sosial.
- Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak
- Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
- Meningkatnya penguatan program dan advokasi pengarusutamaan gender serta perlindungan anak di berbagai sektor yang terintegrasi
- Menguatnya kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan perlindungan anak
- Meningkatnya kualitas dan jumlah lembaga layanan korban kekerasan baik berbasis pemerintah, rumah sakit, masyarakat maupun swasta
- Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak
- Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
- Meningkatnya penguatan program dan advokasi pengarusutamaan gender serta perlindungan anak di berbagai sektor yang terintegrasi
- Meningkatnya kualitas mitigasi bencana alam;
- Meningkatnya kapasitas SDM satuan pelaksana penanggulangan bencana alam;

- Meningkatnya kualitas kelembagaan pengelola penanggulangan bencana alam;
- Meningkatnya pengendalian pengelolaan mitigasi bencana;
- Meningkatnya sarana prasarana mitigasi bencana.

Prioritas 5:

- Meningkatkan perekonomian yang berbasis agribisnis dan ketahanan pangan
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi di bidang agribisnis

Sasaran:

- Meningkatnya Sistem dan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah
- Meningkatnya kelembagaan tata niaga komoditas pertanian
- Terwujudnya sistem investasi daerah yang efektif dan efisien
- Terwujudnya sistem informasi agribisnis
- Meningkatnya ketahanan pangan
- Menngkatnya jejaring agribisnis
- Meningkatnya sistem infrastruktur penunjang agribisnis
- Meningkatnya investasi usaha

Prioritas 6:

- Mengembangkan budaya daerah dan mengintegrasikan sistem pengembangan kepariwisataan daerah.

Sasaran:

- Berkembangnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
- Terfasilitasinya gelar karya kreativitas seni dan budaya lokal;
- Terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan daerah dalam rangka peningkatan kesiapan pariwisata di Kab.Kuningan.

Prioritas 7:

- Pengembangan infrastruktur wilayah terutama dalam bidang pertanian dan pariwisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan strategis secara merata dan berkelanjutan.
- Peningkatan koordinasi penataan ruang yang efektif dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang sinergis dengan tata ruang dan penataan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sasaran:

- Terbangunnya jalan poros antar desa
- meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
- Terpeliharanya sarana irigasi, embung dan waduk serta normalisasi sungai
- Meningkatnya sarana prasarana transportasi menuju kawasan sentra produksi dan kawasan wisata
- Terwujudnya sinergitas tata ruang dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Prioritas 8 :

- Pengelolaan pariwisata alam daerah yang profesional dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan partisipasi aktif masyarakat.
- Peningkatan dan penataan pengelolaan lahan/daerah rawan bencana dengan didukung oleh penghijauan dan penanganan lahan kritis bersama masyarakat.
- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau pemukiman yang dicirikan oleh adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang utuh dan berkelanjutan.

Sasaran:

- Berkembangnya pengelolaan pariwisata alam berbasis masyarakat
- Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata
- Terselenggaranya penataan ruang kawasan rawan bencana
- Meningkatnya tutupan lahan pada kawasan rawan bencana
- Meningkatnya koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian RTH pemukiman

Prioritas 9:

- Peningkatan kinerja sektor utama perekonomian Kab.Kuningan
- Peningkatan investasi daerah
- Peningkatan kerjasama antar daerah dalam bidang perekonomian

Sasaran:

- Meningkatnya UMK/IKM
- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian
- Meningkatnya industri agro dan aneka industri
- Menguatnya jejaring pasar
- Meningkatnya kelembagaan ekonomi di pedesaan

Prioritas 10:

- Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan;
- Peningkatan kualitas SDM aparatur;
- Peningkatan kualitas layanan publik.

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah;
- Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan good governance
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat;
- Meningkatnya pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Prioritas 11:

Membangun “Sistem Satu Data Pembangunan Kabupaten Kuningan”.

Sasaran:

- Terbangunnya kerjasama antar SKPD dan BPS sebagai institusi untuk layanan data dasar
- Terbangunnya Pusat Basis Data di Kabupaten Kuningan
- Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengolahan data

Prioritas 12:

- Peningkatan kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, dan bidang keamanan
- Peningkatan sarana prasarana transportasi menuju kawasan sentra produksi, pemasaran, wisata potensial antar wilayah

Sasaran:

- Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan
- Terjalannya kerjasama antar daerah dalam penyediaan infrastruktur,
- Terjalannya kerjasama antar daerah dalam bidang keamanan
- Meningkatnya sarana prasarana transportasi menuju kawasan sentra produksi, pemasaran, wisata potensial antar wilayah

Prioritas 13:

Peningkatan SDM pengelola dan sistem informasi pengelolaan aset daerah.

Sasaran:

- Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah;
- Meningkatnya sistem informasi pengelolaan aset daerah;
- Meningkatnya kapasitas SDM pengelola aset daerah.

Prioritas 14:

Peningkatan kehidupan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu secara aman dan kondusif.

Sasaran:

- Terlaksananya pemilu secara aman dan kondusif;
- Meningkatnya partisipasi politik masyarakat.

4.2.1. Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014**4.2.1.1 Prioritas Nasional Tahun 2014**

- PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA**
Isu Strategis : - Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
- PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN**
Isu Strategis : - Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin
- Penuntasan rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak
- Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014
- Pelaksanaan pendidikan menengah universal
- PRIORITAS 3 : KESEHATAN**
Isu Strategis : - Penurunan dan pencegahan penyakit (*HIV AIDS* dan Malaria)
- Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata

- PRIORITAS 4 : KETAHANAN PANGAN
Isu Strategis : - Kesejahteraan petani/nelayan
- Peningkatan produksi perikanan
- PRIORITAS 5 : INFRASTRUKTUR
Isu Strategis : - Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan
- Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah
- Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi
- PRIORITAS 6 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
Isu Strategis : - Sistem logistik nasional
- Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru
- PRIORITAS 7 : ENERGI
Isu Strategis : - Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
- Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi
- PRIORITAS 8 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
Isu Strategis : - Pengendalian perubahan iklim
- Peningkatan kualitas lingkungan
- PRIORITAS 9 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK
Isu Strategis : - Pembangunan Daerah Tertinggal
- Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas *Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS)* kawasan perbatasan
- PRIORITAS LAINNYA BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
Isu Strategis : Pembinaanpemasyarakatan

PRIORITAS LAINNYA BIDANG PEREKONOMIAN

- Isu Strategis : - Akselerasi Industrialisasi dengan Sasaran
Pertumbuhan Industri Non-Migas
- Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

PRIORITAS LAINNYA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

- Isu Strategis : - Peningkatan Kerukunan Beragama
- Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional

4.2.1.2 Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

Berdasarkan kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah transisi yang telah ditetapkan, maka kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat, harus tetap memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah transisi. Pembangunan Tahun 2014, diarahkan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan strategis yang telah dimulai perencanaan dan pelaksanaannya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 namun belum berhasil untuk diwujudkan karena adanya kendala teknis maupun kendala non teknis, sehingga memerlukan reorientasi pelaksanaan pembangunan untuk menjamin keberhasilan pembangunan (*beyond the expectation*) serta reposisi pembangunan dengan harapan mendudukkan kembali peran Pemerintah Provinsi melalui upaya penyelesaian permasalahan strategis Provinsi yang sifatnya lintas kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi, serta mengkombinasikan pendekatan pembangunan yang berbasis daerah otonom, pendekatan sektoral dan kewilayahan dengan kegiatan nasional yang berfungsi sebagai penghela pembangunan.

Selain hal tersebut, dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi diharuskan untuk Bermitra Strategis Global sebagai upaya memperkuat jaringan/networking global guna meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing daerah. Implikasi dari skenario rencana

pembangunan diatas, serta perkembangan pembangunan saat ini, tema pembangunan tahunan daerah Jawa Barat tahun 2014, yaitu: *Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat Tinggi Berbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera.*

▪ **Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, yaitu:

- 1) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
- 2) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
- 3) Pengangguran dan ketenagakerjaan.
- 4) Peningkatan ekonomi dan Ketahanan Pangan
- 5) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
- 6) Kualitas lingkungan Hidup.
- 7) Kualitas demokrasi dan Pemilu nasional tahun 2014
- 8) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- 9) Efektivitas Pemerintahan daerah.
- 10) Penanganan ketertiban, Ketentraman Masyarakat.
- 11) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Tahun 2016
- 12) Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 13) Pengelolaan aset daerah
- 14) Budaya dan Destinasi Wisata
- 15) Penegakan dan harmonisasi produk hukum

▪ **Prioritas Pembangunan Daerah**

Prioritas pembangunan Tahun 2014 diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan, dimana prioritas pembangunan sektoral (*Common Goals*) membutuhkan sinergitas lintas bidang dan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik

pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan.

Ciri utama dari sinergitas tersebut sebagai berikut :

1. Tingginya komitmen kebersamaan lintas OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
2. Perencanaan program/kegiatan terpilih dibuat secara bersama-sama seluruh OPD yang terlibat berdasarkan prinsip *SMART PLANNING* dan bersifat akselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
3. Program dan kegiatan terpilih dilaksanakan berdasarkan prinsip *SHEWHART CYCLE (Plan, Do, Check, Action)*.
4. Pelibatan secara aktif lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah pusat serta segenap pelaku pembangunan lain termasuk masyarakat sebagai mitra strategis sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Prioritas pembangunan yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) *Common Goals* adalah:

1. **Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan serta Kepemudaan**, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan pendidikan formal dasar dan menengah
 - b. Penyelenggaraan pendidikan non formal paket A, B dan C plus kewirausahaan dan Keaksaraan Fungsional (KF)
 - c. Penyelenggaraan pendidikan luar biasa
 - d. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
 - e. Pengembangan Infrastruktursarana dan prasarana olah raga bertaraf internasional, Pembinaan atlet dan Pelatih Olah Raga serta Kepemudaan.
2. **Peningkatan Kualitas Kesehatan**, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana serta Prasarana Kesehatan pada Puskesmas dan RSUD
 - b. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kesertaan dalam Program KB

- c. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi
 - d. Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjang
 - e. Meningkatnya Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - f. Menuju *Universal Coverage* JPKM
- 3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat,** dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :
- a. Meningkatnya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
 - b. Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi
 - c. Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat
 - d. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing
 - e. Mengembangkan Industri Kreatif dan penumbuhan Wirausahawan Muda
- 4. Kemandirian Pangan,** dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :
- a. Meningkatnya ketersediaan dan kesinambungan input produksi bahan pangan
 - b. Terkendalinya stock pangan dan keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi
 - c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat
 - d. Meningkatnya dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan pada tahun 2014
- 5. Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Melibatkan Komunitas,** dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan *good governance*
 - b. Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat

- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, hukum, ketertiban, dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan
 - d. Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan.
 - e. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas dalam pembangunan
 - f. Penataan Aset Daerah melalui tertib administrasi aset daerah dan Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
- 6. Pengembangan Infrastruktur Wilayah,** dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :
- a. Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan ekonomi
 - b. Tersedianya Infrastruktur Strategis Pendukung Pengembangan Wilayah dan Kegiatan Ekonomi
 - c. Meningkatnya kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan
 - d. Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur pemukiman dan perumahan
- 7. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku,** dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :
- a. Tersedianya energi untuk mendukung pembangunan Jawa Barat
 - b. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai penyedia air baku serta pengendali banjir dan kekeringan
- 8. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup,** dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :
- a. Meningkatnya Efektivitas Mitigasi dan Percepatan Penanganan Bencana
 - b. Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung dan penangan lahan kritis
 - c. Meningkatnya kualitas lingkungan udara dan air
 - d. Meningkatkan kesiapan antisipasi perubahan iklim
- 9. Pembangunan Perdesaan,** dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan
 - b. Meningkatnya peran Aparat Desa dalam pembangunan

- c. Meningkatnya sarana dan prasarana desa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan
- d. Meningkatnya peran kelembagaan tingkat desa
- e. Meningkatnya peran masyarakat desa dalam menumbuhkan perekonomian desa

10. Pemberdayaan Budaya Lokal Dan Destinasi Wisata

- a. Terkelolanya eksplorasi dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
- b. Terfasilitasinya Gelar Karya serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal
- c. Terintegrasinya Sistem Pengembangan Kepariwisata Daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataan di Jawa Barat

▪ Prioritas Kewilayahan

Prioritas Kewilayahan merupakan sasaran pembangunan berdimensi

kewilayahan di Jawa Barat, dalam rangka mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Pembangunan kewilayahan yang dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, baik antar kabupaten dan kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan, melalui kebijakan pembangunan kewilayahan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) wilayah pengembangan (WP) yaitu:

1. WP Bodebekpunjur

WP Bodebekpunjur meliputi Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis, dan agrowisata.

2. WP Purwasuka

WP Purwasuka meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan

Kabupaten Karawang. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan.

3. WP Ciayumajakuning

WP Ciayumajakuning meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang.

Sektor unggulan yang dikembangkan adalah agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

4. WP Priangan Timur-Pangandaran

WP Priangan Timur-Pangandaran meliputi Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan, dan pertambangan mineral.

5. WP Sukabumi dsk

WP Sukabumi dsk meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, bisnis kelautan, dan pertambangan mineral.

6. WP Cekungan Bandung

WP Cekungan Bandung meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten

Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah pertanian, hortikultura, industri non polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perkebunan.